

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

Tahun 1978, Suaka Margasatwa Wasur ditunjuk dengan luas 206.000 ha dan Cagar Alam Rawa Biru dengan luas 4.000 ha. Tahun 1990 Menteri Kehutanan menyatakan Suaka Margasatwa Wasur seluas 409.810 ha. dan Cagar Alam Rawa Biru seluas 4.000 ha. sebagai taman nasional. Penunjukan Taman Nasional Wasur sendiri baru dilakukan Menteri Kehutanan pada tahun 1997 berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 282/KPTS-VI/1997 dengan luas 413.810 ha., melalui perubahan fungsi Suaka Margasatwa Wasur seluas 409.810 ha dan Cagar Alam Rawa Biru seluas 4.000 ha. Sehingga total luas Taman Nasional Wasur menjadi 413.810 ha.

Di Taman Nasional Wasur terdapat 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kampung yaitu:

- a. Desa Wasur (di sektor Jalan Trans Irian)
- b. Desa Rawa Biru (di sektor Jalan Trans Irian)
- c. Desa Yanggandur (di sektor Jalan Trans Irian)
- d. Desa Sota (di sektor Jalan Trans Irian)
- e. Desa Kuller (di sektor pantai)
- f. Desa Onggaya (di sektor pantai)
- g. Desa Tomer (di sektor pantai)
- h. Desa Tomerauw (di sektor pantai)
- i. Desa Kondo (di sektor pantai)
- j. Desa Soa (di sektor Sungai Maro)
- k. Desa Tambat (di Sektor Sungai Maro)
- l. Kampung Bokrum (di sektor Sungai Maro).

Penduduk asli yang menghuni Taman Nasional berasal dari 4 (empat) suku yaitu Suku Kanum, Suku Marori Men-Gey, Suku Marind dan Suku Yei.

Dalam perkembangannya masuk beberapa suku dari luar melalui cara kawin dan persahabatan. Sebagian besar areal di sepanjang Jalan Trans Irian dan Sungai Maro, yang saat ini dihuni oleh Suku Muyu merupakan pemberian masyarakat asli sebagai emas kawin atas putri-putri mereka yang kawin dengan masyarakat asli. Selain Suku Muyu, masih ada suku lain seperti Suku Timor, Kei, Jawa, dan Bugis. Jumlah penduduk yang ada di dalam Taman Nasional Wasur sebanyak 1.453 orang yang tersebar pada 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kampung.

Jenis-jenis satwa yang dilindungi di dalam taman nasional wasur dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.1: jenis-jenis satwa dalam taman nasional wasur<sup>38</sup>

No	Satwa	Status berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990
1.	Rusa	Populasinya jarang
2.	Kanguru/wallaby	Bahaya kepunahan
3.	Rayap	Populasinya jarang
4.	Burung cendrawasih	Bahaya kepunahan
5.	Kasuari	Populasinya jarang

<sup>38</sup> Data di olah dari <http://pika.ksdae.menlhk.go.id/assets/images/favicon.png>. Di akses pada tanggal 17 mei 2017

**B. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kualifikasi tindak pidana terkait pelanggaran larangan perburuan satwa rusa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur**

Hewan sebagai bagian dari alam merupakan karunia oleh tuhan yang mesti dijaga. Terhadap tindakan penyiiksaan hewan oleh manusia harus dicela dan dianggap sebagai perbuatan jahat. Perbuatan yang jahat itu dirumuskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu delik yang diancam oleh hokum pidana. Hukum pidana pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi jiwa, kehormatan, martabat dan harta benda yang dimiliki subyek hokum manusia. Namun pada perkembangannya hokum pidana juga ditujukan untuk melindungi hak-hak dari pada hewan. Bukan karena hewan dipersamakan dengan manusia akan tetapi lebih kepada melindungi ekosistem.

Kesadaran manusia akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, membuat Perkembangan hokum lingkungan menjadi pesat. Perkembangan itu pula berbanding lurus dengan pengembangan-pengembangan teori akan hokum lingkungan. Adapun teori itu adalah *pertama*, teori hak yang dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat sehingga masyarakat atau Negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu.<sup>39</sup>

Kegiatan-kegiatan perburuan yang dilakukan jika dilakukan atas dasar kepentingan pribadi seperti memburu hewan atas dasar ekonomi maupun hobi

---

<sup>39</sup> Takdir Rahmadi.2013. *Hokum Lingkungan di Indonesia, cetakan ke-3*.PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hal 35

harus dilarang. Karena perbuatan tersebut dapat mengancam eksistensi hewan. Artinya, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kepunahan bagi hewan. Kepunahan hewan akan mengganggu stabilitas lingkungan hidup yang berikutnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi kepentingan manusia. Selain atas dasar kepentingan itu perburuan juga patut dicela secara moral karena dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi hewan yang bersangkutan.

Beberapa sarjana mengusulkan perlunya membangun etika ekologis dan hak-hak hewan sebagai dasar bagi hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Aldo Leopold mengusulkan perlunya konsep etika tanah, yaitu aturan perilaku untuk melindungi komunitas yang tidak saja terdiri atas manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan.<sup>40</sup> Dengan kata lain harus ada perlakuan yang sama bagi semua makhluk sebagai bagian dari komunitas etik. Peter Singer mengusulkan bahwa semua makhluk, baik manusia maupun bukan asalkan makhluk itu dapat mengekspresikan rasa sakit atau penderitaannya seharusnya dipandang setara secara moral.<sup>41</sup> Sehingga hewan sebagai makhluk juga perlu diakui hak-hak moralnya. Bukan karena mereka dapat bernalar atau dapat berbicara, tetapi karena mereka dapat mengalami penderitaan. Oleh karena itu, menurut para penganjur hak-hak hewan, hewan-hewan memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk kebahagiaan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal 37

<sup>41</sup> *ibid.* Hal 37

Jika Leopold dan Singer mengusulkan perlunya hak-hak moral bagi hewan, Stone bahkan lebih jauh mengusulkan perlunya lingkungan hidup alami seperti tanah, sungai, hutan dan hewan diberi hak-hak hukum. Bahwa sebuah hak baru memiliki makna bagi pemegang hak itu jika memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, bahwa hukum mewajibkan pejabat atau instansi pemerintah untuk menilai dan mengkaji kegiatan-kegiatan yang mungkin bertentangan dengan atau melanggar hak itu. *Kedua*, si pemegang hak dapat mengajukan gugatan atas namanya jika haknya terancam. *Ketiga*, dalam menentukan pemulihan hukum, pengadilan mesti mempertimbangkan kerugian atas hak itu. *Keempat*, pemulihan itu mesti diberikan untuk kepentingan pemegang hak itu.<sup>42</sup> Berkaitan dengan syarat yang kedua itu, Stone menggunakan analogi yang sama dengan korporasi. Bahwa korporasi tidak dapat mengajukan gugatan sendiri namun dapat mengajukan gugatan melalui perwakilannya sehingga sudah barang tentu lingkungan hidup juga dapat melakukan hal yang sama. Dengan demikian tidak ada masalah jika lingkungan hidup diberikan hak-hak hukum. Pengajuan gugatan oleh lingkungan hidup melalui perwakilannya merupakan wujud dari pemberian hak-hak hukum terhadap lingkungan.

Teori paternalisme dibangun atas dasar asumsi, bahwa manusia secara individual seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya atau membuat pilihan-pilihan yang tidak matang atau bodoh.<sup>43</sup> Manusia secara

---

<sup>42</sup> *ibid.* Hal 39

<sup>43</sup> *ibid.* Hal 43

individual jika diberikan kebebasan untuk bertindak berdasarkan kehendaknya, maka dapat sewaktu-waktu merugikan dirinya sendiri, masyarakat secara luas serta lingkungan. Sehingga kebebasan yang dimiliki itu setidaknya dapat diatur dan diarahkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap hewan, maka pemerintah harus membuat peraturan-peraturan seperti menetapkan kawasan sebagai suatu kawasan konservasi sebagai kawasan terlarang untuk dilakukan berbagai kegiatan berburu.

Perbuatan-perbuatan memburu, menangkap dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu setidaknya karena tiga alasan. Alasan-alasan itu tidak berkaitan dengan adanya ancaman bahaya atau kerugian terhadap kehidupan dan jiwa manusia sebagaimana yang tampak dalam masalah pencemaran, tetapi lebih didasarkan pada prinsip-prinsip ekologis. Alasan pertama di dasarkan pada prinsip *the web of life* (jaring kehidupan). Prinsip ini mengakui adanya saling ketergantungan diantara segala sesuatu di alam ini. Saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati, maupun antara sumber daya hayati dengan sumber daya nohayati.<sup>44</sup>

Alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan prinsip ini, semakin beragamnya jenis tumbuhan dan satwa menunjukkan kekayaan ekosistem yang patut dijaga sebagai karunia tuhan.

---

<sup>44</sup> *ibid.* Hal 222-223

Alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan oleh Aldo Leopold dalam konsep etika tanah (*land ethic*). Menurut Leopold, manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit, dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.<sup>45</sup> Artinya, harus ada perlakuan yang sama terhadap keseluruhan unsur dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, akan terbentuk suatu komunitas etik sebagaimana yang dimaksud.

Meskipun tidak ada alasan yuridis berdasarkan teori-teori, prinsip-prinsip dan konsep-konsep di atas, akan tetapi dengan di undangkannya undang-undang no 5 tahun 1990 maka sejak saat itu pula hewan atau lingkungan hidup mempunyai hak. Artinya, hewan atau lingkungan hidup memiliki hak-hak hukum, dimana pelanggaran terhadap hak-hak tersebut terhadap pelaku dapat diterapkan sanksi pidana.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 yang berfungsi sebagai sarana hukum bagi pelaksana konservasi sumberdaya alam hayati hanya memuat rumusan pidana yang dikenakan atas perbuatan merusak lingkungan hidup saja, akan tetapi lebih spesifik dari pada perumusan perbuatan merusak yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>46</sup>

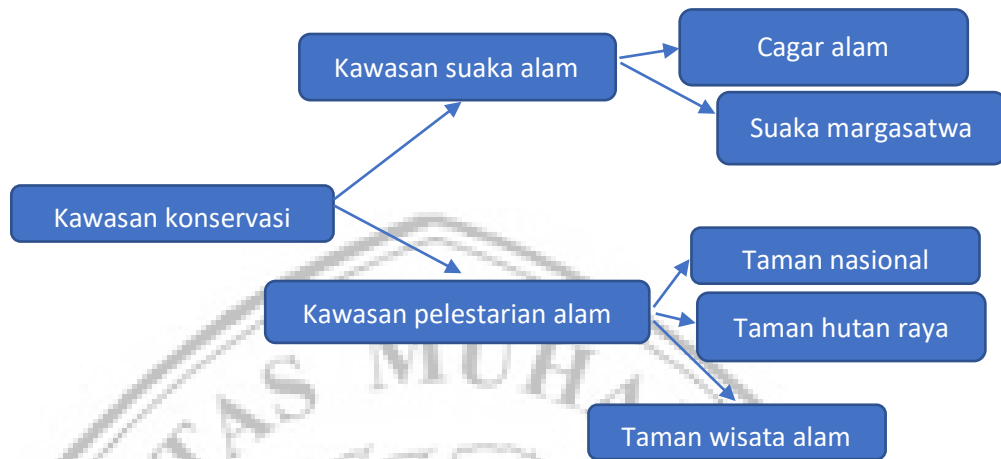
Perlindungan terhadap sumberdaya alam di Indonesia dilakukan dengan membentuk kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu selanjutnya

---

<sup>45</sup> *ibid.* Hal 223

<sup>46</sup> *ibid.* Hal 224

dibagi menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Adapun konsep pembagian kawasan konservasi itu dapat dilihat dalam gambar berikut:



Taman nasional kemudian dikelola berdasarkan system zonasi. Adapun system zonasi yang dimaksud Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, zona taman nasional terdiri dari:

1. Zona inti,
2. Zona rimba, zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan.
3. Zona pemanfaatan,
4. Zona lain, antara lain (a) zona tradisional; (b) zona rehabilitasi; (c) zona religi, budaya dan sejarah; dan (d) zona khusus.

Zona inti (*core/sanctuary zone*) merupakan bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Zona ini berfungsi sebagai tempat melindungi dan berkembang biaknya satwa liar, tidak boleh dikunjungi oleh umum, kecuali dalam rangka penelitian dan tidak boleh ada bangunan apapun.



Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Dapat dikembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata alam.

Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Pada zona rimba dapat dilakukan perlindungan, pengawetan, pembinaan flora dan fauna beserta habitatnya bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

Zona tradisional bagian taman nasional untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya. Zona religi, budaya dan sejarah bagian dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Zona khusus bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindari telah terdapat kelompok masyarakat dan atau sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Berdasarkan konsep pembagian kawasan dalam taman nasional, tidak ada satu pun kawasan yang memperbolehkan melakukan aktivitas perburuan. Dengan demikian, aktivitas

perburuan yang dilakukan dalam taman nasional merupakan suatu bentuk tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di bidang konservasi saat ini kurang memberikan ruang bagi hak-hak masyarakat untuk menikmati manfaat langsung dari kawasan konservasi bagi peningkatan kesejahteraannya. Masyarakat hanya dimungkinkan melakukan kegiatan budidaya tradisional, dan harus tinggal menetap diluar kawasan konservasi sekalipun keberadaan mereka sudah ada jauh hari sebelum kawasan tersebut ditunjuk. Di sisi lain, Permenhut No. P.56 Tahun 2006 membuka kemungkinan masyarakat menetap di zona khusus dalam Taman Nasional.

Kebiasaan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal dan telah diwariskan sejak jaman dulu, seperti berburu, mengambil kayu dan pengambilan tumbuhan obat menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dan diancam pidana setelah kawasan tersebut menjadi KSA atau KPA. Sekalipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri No. P.19 Tahun 2005 tentang kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA (Permenhut ini merupakan terobosan, karena payung hukum berupa PP maupun UU yang lebih tinggi belum ada), hak-hak masyarakat belum diatur secara jelas. Permenhut tersebut baru sebatas mengatur kerja sama pada beberapa bagian dari pengelolaan kawasan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dewan Kehutanan Nasional.2010.*Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha Dan Hak-Hak Masyarakat Akan Pengamanan/Perlindungan, Pengelolaan Maupun Pemanfaatan Sumber Daya Hutan*.Jakarta. hal 13-14

Pengaturan perlindungan terhadap hewan telah diatur dalam Pasal 302 KUHP penganiayaan terhadap hewan. Namun pasal tersebut merupakan pengaturan secara umum serta dinilai pengaturan tersebut masih sangat minim ancaman pidananya. Artinya, pengaturan tersebut hanya ditujukan terhadap perlindungan hewan saja, tidak termasuk habitatnya. Secara khusus dalam pasal 40 jo pasal 21 uu no 5 tahun 1990 memberikan pengaturan yang sangat khusus tentang perlindungan hewan. Artinya pengaturan secara khusus ini ditujukan terhadap perlindungan hewan sekaligus terhadap habitat atau tempat tinggal dari hewan tersebut. Dalam ketentuan pasal tersebut ancaman pidana yang diberikan cukup tinggi yaitu ancaman pidana penjara selama 5 tahun untuk kejahatan dan 1 tahun untuk pelanggaran.

Dasar hukum untuk pengelolaan di perkuat dengan disahkannya uu no 5 tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi system pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman hewan dan tanaman, termasuk ekosistemnya dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.<sup>48</sup> Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perburuan satwa liar.

---

<sup>48</sup> Charles Victor Barber et.al.1997.*Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.Hal 32

Latar belakang diberlakukannya uu no 5 tahun 1990 adalah keinginan untuk mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksana UU No 5 Tahun 1990.<sup>49</sup> Undang-undang no 5 tahun 1990 yang memuat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang termaktud dalam uu no5 tahun 1990 tertera pada pasal 19,21,33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.<sup>50</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut tindak pidana dalam kawasan konservasi terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), yaitu tindak pidana Pasal 40 ayat (2) merupakan tindak pidana sengaja (*dolus*), dan tindak pidana Pasal 40 ayat (4) merupakan tindak pidana kelalaian/kealpaan (*culpa*). Perbedaan lainnya, yaitu tindak pidana Pasal 40 ayat (2), yang memiliki unsur sengaja, merupakan tindak pidana kejahatan (*misdriff*), sedangkan tindak pidana Pasal 40 ayat (4), yang memiliki unsur kelalaian, merupakan tindak pidana pelanggaran

---

<sup>49</sup> Saifullah.2007.*Hukum Lingkungan Paradigm Kebijakan Criminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*.Uin Malang Press.Malang.Hal 35

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal 129

(*overtreding*). Apabila diperhatikan lebih dalam unsur perbuatan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dan 4, tidak memiliki perbedaan justru memiliki kesamaan.

Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) ini dikenakan dengan “satwa yang dilindungi”. Pengertian “satwa” itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1990 bahwa, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Istilah “satwa yang dilindungi” tidak diberikan definisi dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990. Sehubungan dengan ini dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1990 diberikan ketentuan:

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
  - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
  - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 20 ayat (1) diberikan keterangan antara lain bahwa dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan penjelasan pasalnya dapat dikatakan bahwa satwa yang dilindungi adalah spesies satwa yang dilindungi

agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Satwa yang dilindungi ini ada yang dalam bahaya kepunahan dan ada yang populasinya jarang. Menurut Pasal 20 ayat (3), ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 ini telah diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bagian Lampiran Peraturan Pemerintah ini memuat Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Masyarakat suku asli di taman nasional wasur identik dengan alam sehingga alam harus dijaga dan dilestarikan dengan hukum adat. Upaya perlindungan wilayah yang dimiliki masyarakat adat umumnya melekat dalam kehidupan mereka agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berkesinambungan. Pandangan antara keseimbangan lingkungan hidup dengan manusia ini juga didukung oleh pernyataan Dumatubun *dalam*. Dumatubun pandangan tentang sehat dan sakit oleh masyarakat adalah apabila tidak ada lagi keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia maka penyakit akan menyerang. Etika dan aturan konservasi Pengelolaan sumber daya alam secara tradisional telah dilakukan oleh masyarakat suku asli yang berada dalam kawasan taman nasional wasur seperti kearifan sasi adat, kearifan terhadap

tempat-tempat sakral, sistem totemisme, sistim perburuan dan sistim pendidikan.<sup>51</sup>

- a. Sasi merupakan suatu ritual yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dalam pemanfaatannya dilakukan secara bijak. Ritual sasi dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai wilayah atau jenis yang disasi dan dihadiri oleh semua marga yang ada dan kepala Suku. Ritual sasi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi binatang buruan dan/atau tanaman untuk berkembang biak. Ritual pelaksanaan sasi umumnya dilakukan dengan mengikatkan alang-alang dan janur kelapa pada tiang pancang, pohon mati, kayu yang disilangkan atau diletakkannya atribut sasi seperti yang dipasang pada batas-batas dusun atau jalur akses masuk. Jenis-jenis sasi yang dilakukan oleh keempat masyarakat asli tersebut berupa sasi rawa, sasi dusun sagu, sasi dusun kayu dan sasi kebakaran. Pemberlakuan sasi dapat dikelompokkan secara langsung dan tidak langsung. 1). *Langsung*, pemberian tanda peringatan tertentu di lokasi sasi agar orang lain mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang disasi. 2). *Tidak langsung*: upaya penerapan sasi dilakukan dengan memberikan informasi dan pengumuman kepada masyarakat atau marga lainnya di kampung terhadap tempat tertentu, jenis kayu, hewan, tanaman atau ikan yang mengalami degradasi atau deplesi untuk diketahui dan dihindarkan.<sup>52</sup>
- b. Tempat sakral merupakan suatu wilayah atau tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat adat yang secara turun temurun dijaga kelestarian dan keasliannya. Tempat-tempat sakral bagi masyarakat adat merupakan tempat keramat yang tidak boleh dimasuki ataupun mengambil hasil dari lokasi tersebut secara bebas dikarenakan masyarakat menghormati *dema* dan takut terjadi bencana atau ganjaran dari *dema*. Menurut kepercayaan masyarakat asli yang ada di dalam Kawasan TNW terdapat banyak tempat-tempat sakral berupa tanah tinggi (*dek*), tempat lapang, hutan, pohon, sumur (mata air).<sup>53</sup>
- c. Dalam kehidupan masyarakat Malind Anim dikenal adanya totem, yang merupakan suatu kepercayaan suku Malind Anim terhadap satwa dan tumbuhan yang dianggap dan dipercaya sebagai leluhur mereka. Totem tersebut merupakan satwa dan tumbuhan asli (endemik) yang ada di wilayah adat mereka.

<sup>51</sup> Yarman.2012.interaksi masyarakat suku asli (masyarakat adat) dengan masyarakat pendatang dan implikasinya pada rancangan pengelolaan taman nasional wasur.institut pertanian bogor.bogor. Hal 39

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kasimirus Gebze kepala suku Malind Imbuti tanggal 10 januari 2017

<sup>53</sup> Wawancara dengan Martin Ndiken kepala suku Kanume tanggal 15 januari 2017

Dalam kehidupan tradisional masyarakat suku asli yang ada di TNW memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, baik yang berasal dari dalam totemnya maupun di luar totem marga. Pemanfaatan totem yang berasal dari luar marga diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik totem tersebut dan memperlakukan tumbuhan dan satwa yang menjadi totem marga lain sesuai dengan aturan marga tersebut. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi berupa teguran yang dilanjutkan denda dengan tanaman wati (*Piper methisticum*), membuat bedeng untuk kebun kumbili (jenis umbi-umbian) dan penyerahan hasil kebun berupa ubi, pisang dan apabila masih melakukan pelanggaran maka dikenakan hukuman mati.<sup>54</sup>

- d. Berburu merupakan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan berburu yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dilakukan dengan menggunakan busur (panah) dengan bantuan anjing. Kegiatan ini dilakukan dengan menargetkan hewan buruan jantan dewasa pada lokasi buru sesuai kepemilikan marganya. Memperlakukan satwa buruan juga dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Pemburu yang berasal dari marga bukan pemilik totem harus meminta izin untuk melakukan perburuan pada jenis hewan tertentu ke marga pemilik totemnya, hasil buruan harus dibagi dengan pemilik totem. cara-cara perburuan tradisional masyarakat suku asli yaitu menggunakan panah dan/atau mengkombinasikan penggunaan api, anjing dan anak panah atau kayu pemukul yang dilakukan pada saat musim kemarau. Kegiatan berburu yang dilakukan oleh masyarakat suku asli dilakukan sesuai dengan aturan dari marga-marga suku tersebut. Waktu berburu dilakukan pada sore dan malam hari, hal ini diduga agar satwa buruan tidak takut dan lari ketempat lain. aturan dalam memanah satwa buruan harus diarahkan ke lambung satwa atau di bawah telinga, hal ini dimaksudkan agar satwa tidak merasa sakit terlalu lama. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berupa peringatan dan nasehat oleh marga atau ketua adat. Denda yang diberikan kepada pelanggar bisa berupa tanaman wati, babi dan hasil alam lainnya seperti pisang, keladi dan tebu dengan jumlah yang diputuskan pada acara musyawarah adat atau sidang adat.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wawancara dengan David Dagijai kepala suku Yeinan tanggal 19 januari 2017

<sup>55</sup> Wawancara dengan Wilhemus D Gebze kepala suku Marori Men Gey tanggal 23 januari 2017



Mata pencaharian penduduk asli taman nasional wasur adalah berburu satwa liar dan berkebun.<sup>56</sup> Tujuan dari pada berburu satwa liar adalah untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan sebagai sumber pendapatan.<sup>57</sup> Seiring perkembangan waktu, berburu satwa liar tidak hanya dijadikan sebagai sumber protein hewani masyarakat, akan tetapi juga sebagai tambahan pemasukan bagi masyarakat setempat.

Satwa liar yang paling banyak diburu adalah jenis rusa timor (*cervus timorensis*). Menurut keterangan ibu fince, bahwa harga daging rusa yang di jual sekitar Rp. 30.000/kg, daging rusa ini di dapat dari masyarakat asli papua yang di buru dalam taman nasional wasur.<sup>58</sup>

Rusa timor (*cervus timorensis*) dalam lampiran PP No 7 Tahun 1999 disebutkan nomor 11 semua jenis menjangan, rusa sambar (jenis cervus) masuk dalam jenis-jenis satwa yang dilindungi. Dengan penegasan yang demikian maka perbuatan yang berkaitan dengan perburuan rusa merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam uu no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Table 1.2 Daftar Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagai berikut:

1.	Anoa depressicornis	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2.	Anoa quarlesi	Anoa pegunungan
3.	Arctictis binturong	Binturong

<sup>56</sup> Erikson.2002. *Studi Populasi Rusa Timor (cervus timorensis) dan Perburuan Oleh Penduduk Desa Poo, Tomer dan Sota Dalam Taman Nasional Wasur Merauke*.Universitas Negeri Papua.Manokwari.Hal 24

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal 41

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Ibu Fince Selaku Penjual Daging Rusa Di Pasar Baru Kota Merauke. Pada Tanggal 13 Januari 2017

4.	<i>Arctonyx collaris</i>	Pulusan
5.	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6.	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8.	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9.	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10.	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
<b>11.</b>	<b><i>Cervus spp.</i></b>	<b>Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i>)</b>

Jika melihat antara mata pencaharian dikaitkan dengan aturan adat mengenai konservasi, maka hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) dan (4). Padahal dengan aturan adat mengenai konservasi itu dapat membantu pihak pemerintahan dalam hal pengawasan perburuan yang dilakukan. Akan tetapi meskipun perburuan rusa telah mengikuti aturan konservasi adat, terhadap perbuatan tersebut tetap dapat dipidana. Seharusnya undang-undang dapat memberikan ruang terhadap aturan-aturan adat yang demikian sebagai salah satu alasan penghapus tindak pidana.

Table 1.3 Data Kasus Pelanggaran Terhadap Satwa Rusa<sup>59</sup>

No	Jenis pelanggaran terhadap satwa rusa berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Pasal 21 ayat 2 huruf a	5	3	8

<sup>59</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan kepala suku dalam taman nasional wasur, hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang terdapat dalam UU no 5 Tahun 1990

2.	Pasal 21 ayat 2 huruf b	1	1	3
3.	Pasal 21 ayat 2 huruf c			
4.	Pasal 21 ayat 2 huruf d	1	3	1
5.	Pasal 21 ayat 2 huruf e			

Table diatas menunjukkan data pelanggaran-pelanggaran yang selama ini telah dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berdasarkan hukum adat dengan system pembayaran sasi. Terhadap pelaku pelanggaran pasal 21 huruf a dari tahun 2014 sampai tahun 2016, telah diberikan sanksi berupa peringatan dan nasehat dan kemudian diwajibkan membayar denda berupa hasil-hasil alam. Bentuk kongkrit pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku adalah perburuan rusa di kawasan adat yang belum mendapatkan ijin dari kepala suku.

Terhadap pelanggaran pasal 21 huruf b, merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Akan tetapi, dalam pandangan masyarakat adat hal itu bukanlah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan adat. Bentuk perbuatan yang dilakukan adalah memperjualbelikan daging rusa. Data dari tahun 2014 sampai 2016 hanya terdapat 5 kasus. Data ini di dapat dari laporan si pemilik daging rusa yang akan diperdagangkan kepada kepala suku. Sebenarnya, jumlah kasus yang ada di lapangan lebih dari 5 kasus. Ketika peneliti melakukan observasi secara langsung dilapangan, peneliti menemukan rata-rata transaksi jual beli daging rusa per hari mencapai 2 ekor.

Pelanggaran-pelanggaran pasal 21 huruf c dan e tidak terdapat laporannya sama sekali. Oleh karena, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap aturan adat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan rusa oleh masyarakat adat.

Berikut yang dapat digambarkan perbuatan-perbuatan masyarakat berkaitan dengan perlindungan rusa dalam taman nasional wasur

Table 1.4 Perbuatan Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Perburuan Rusa

No	Perbuatan masyarakat	Aturan pidana yang berkaitan
1.	Perburuan rusa yang dilakukan secara tradisional dan moderen	Pasal 40 ayat 2 uu no 5 tahun 1990 Pasal 40 ayat 2 uu no 5 tahun 1990
2.	Perdagangan rusa melalui pengepul yang kemudian dijual kembali ke kota merauke	Pasal 40 ayat 2 uu no 5 tahun 1990
3.	Penjualan daging rusa yang telah diolah (dendeng rusa) dan tanduk rusa	Pasal 40 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1990

### C. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum Terkait Perburuan Satwa Rusa yang Dilindungi di Wilayah Taman Nasional Wasur

#### a. Penindakan

Bagi para pelanggar sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam table-tabel sebelumnya, sampai saat ini belum ada sama sekali penindakan terhadap pelaku. Maksudnya penindakan sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 40 ayat (1) sampai (5) belum dilaksanakan sama sekali.

Meskipun perburuan masih saja dilakukan. Selama ini tindakan terhadap pelaku hanya dilakukan berdasarkan hukum adat yang ada dimasyarakat. Bentuk penindakan itu berupa pembayaran sasi. Pembayaran sasi yang selama ini diberlakukan tidak menimbulkan dan menekan jumlah perburuan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan system pembayaran sasi dilakukan apabila para pemburu tidak meminta izin sebelumnya kepada pihak adat. Jika berkaitan dengan wilayah perburuan yang dilakukan oleh para pemburu di kawasan adat. Namun, jika telah mendapatkan ijin dari pihak adat maka perburuan yang dilakukan dianggap legal dan tidak ada sanksi apa-apa terhadap pemburu.

Dengan demikian, atas alasan pemberian ijin dari pihak adat kepada pemburu inilah dapat menjadi celah dalam usaha perlindungan satwa rusa. Artinya lama kelamaan aktivitas perburuan dapat dianggap sebagai suatu kebiasaan yang legal dan tidak melanggar hukum apa pun.

b. Pencegahan

Upaya pencegahan agar populasi satwa rusa tetap terjaga sehingga terhindar dari kepunahan adalah dengan melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Dengan upaya demikian masyarakat dapat ikut serta dalam usaha pengawasan terhadap satwa rusa. Hal ini pun akan dengan sendirinya menurunkan dan menekan tingkat perburuan terhadap rusa oleh masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis justru upaya yang demikian tidak ditemukan sama sekali.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan hanya berupa himbauan-himbauan untuk melakukan perburuan di dalam taman nasional wasur. Himbauan-himbauan itu berbentuk papan yang bertuliskan larangan-larangan dan ditancapkan ke tanah. Tentunya upaya pencegahan yang demikian sangat tidak efektif. Selain itu banyak kawasan yang belum diawasi dikarenakan jumlah personil polisi hutan yang sangat minim yang tidak sepadan dengan jumlah kawasan yang harus diawasi.

c. Aspek kendala dalam penegakan hukum terkait perburuan satwa rusa yang dilindungi

Rendah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar khususnya rusa. Hal ini diakibatkan karena pemahaman masyarakat beranggapan rusa sebagai pemenuhan sumber protein yang sejak dulu telah dikonsumsi secara turun temurun. Sehingga perburuan terhadap rusa merupakan suatu hal yang biasa bahkan dianggap sebagai kebiasaan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daging rusa yang dijual secara bebas oleh masyarakat. Selain itu adanya alasan legalitas berdasarkan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum adat tersebut adalah system sasi. Sepanjang pemburu telah mendapatkan ijin berburu di kawasan adat yang berada di taman nasional wasur, dengan demikian aktivitas berburu tersebut telah dianggap sebagai tindakan yang legal dan tidak bertentangan dengan hukum apapun.

Selain itu, dengan keterbatasan jumlah personil polisi hutan menambah kerumitan tersendiri dalam hal penegakan. Jumlah personil polisi hutan di kawasan taman nasional wasur sekitar 21 orang yang harus mengawasi

413.810 hektar luas kawasan taman nasional wasur. Jika jumlah polisi hutan ini diberikan tanggungjawab mengawasi luas kawasan taman nasional wasur secara sama, maka di dapat 1 orang personil polisi hutan harus mengawasi kurang-lebih 19.705 hektar. Terhadap hal ini sebenarnya telah diberikan solusi dengan ikut melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dari 12 kampung yang ada di dalam taman nasional wasur diambil 1 orang untuk ikut terlibat dalam patroli bersama polisi hutan.

Solusi yang demikian menurut penulis bukan merupakan sebuah solusi untuk penegakan hokum terhadap aktivitas perburuan rusa yang dilakukan.

Hal ini karena berapapun jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam hal pengawasan, mereka tidak memiliki kewenangan menindak pelaku perburuan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh polisi hutan.

